

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak jalanan merupakan masalah sosial yang menjadi fenomena menarik dalam kehidupan bermasyarakat. Kita bisa menjumpai anak-anak yang sebagian besar hidupnya berada di jalanan pada berbagai titik pusat keramaian di kota besar, seperti di pasar, terminal, stasiun, *traffic light*, pusat pertokoan, dan sebagainya. Kehidupan jalanan mereka terutama berhubungan dengan kegiatan ekonomi, antara lain mengamen, mengemis, mengasong, kuli, loper koran, pembersih mobil, dan sebagainya. Meskipun ada pula sekumpulan anak yang hanya berkeliaran atau berkumpul tanpa tujuan di jalanan (Suyanto, 2010).

Kejadian tersebut merupakan fenomena gunung es yang membutuhkan penanganan serius karena meledaknya jumlah anak jalanan. Menurut *United Nations International Children's Fund* (UNICEF) jumlah anak jalanan di dunia mencapai 100 juta jiwa, 30 juta diantaranya terdapat di Asia (Arifin, 2001). Dari data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Departemen Sosial Republik Indonesia (Depsos RI) tahun 2007, jumlah anak jalanan di Indonesia mencapai 104.497 jiwa. Di Kota Surakarta tahun 2009 tercatat 62 anak jalanan yang tersebar di lima kecamatan yakni Serengan, Banjarsari, Laweyan, Pasar Kliwon, dan Jebres. Selanjutnya tahun 2010 tercatat 70 anak jalanan. Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pinggiran (PPAP) SEROJA mendata sebanyak 50 anak jalanan yang dapat terjangkau oleh programnya. Ini menunjukkan peningkatan jumlah anak jalanan yang signifikan.

Konsep anak jalanan diidentifikasi sebagai gejala akibat krisis ekonomi dan urbanisasi berlebih di kota besar (Suyanto, 2010). Menurut UNICEF, tumpukan hutang dan krisis ekonomi akan mengurangi jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak (Arifin, 2001). Hak tersebut yaitu hak mendapatkan pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan seperti yang dijelaskan oleh Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres RI)

No. 3 tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak bahwa proses pembangunan untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang maju, mandiri dan sejahtera, diperlukan pembinaan kualitas anak. Programnya yaitu pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun (Wajar 9 tahun), peningkatan minat baca dan belajar guna penumbuhan wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk membangun suatu bangsa dan karakterisasi identitasnya, dilakukan upaya memajukan pendidikan dengan harapan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas (Mutrofin, 2009). Penyelenggaraan pendidikan dan suasana belajar yang ideal akan mengembangkan kepribadian dan meningkatkan kecerdasan generasi penerus sesuai minat dan bakatnya. Dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah menetapkan jenjang pendidikan formal. Ada pula jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan sebagai pengganti dan pelengkap pendidikan formal, yang hasilnya dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh pemerintah.

Upaya nyata pemerintah melindungi anak diwujudkan lewat pengembangan Kota Layak Anak (KLA) yaitu kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga. Pemerintah Kota Surakarta banyak melakukan sosialisasi sebagai proyek percontohan KLA (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, 2009). Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pinggiran (PPAP) SEROJA adalah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial bagi masyarakat pinggiran terutama perempuan dan anak-anak di Kota Surakarta dan sekitarnya. Masyarakat pinggiran adalah kalangan yang terpinggirkan secara ekonomi, sosial, pendidikan, politik bahkan moral. Mereka adalah pemulung, buruh, pekerja seks komersial, anak jalanan, anak keluarga miskin serta pekerja anak (Lembaga PPAP SEROJA, 2010). Salah satu usaha lembaga ini dalam menangani masalah pendidikan anak jalanan adalah pengadaan program kelompok belajar Paket A setara SD/MI. Ini sebagai perwujudan program Wajar 9 tahun dari pemerintah untuk anak jalanan yang dengan alasan tertentu belum bisa menempuh pendidikan formal di sekolah, disediakan fasilitas untuk belajar dengan hasil yang bisa disetarakan dengan pendidikan formal.

Anak jalanan yang sebagian besar hidupnya berada di jalan, secara simultan terpapar oleh lingkungan jalanan. Lingkungan yang apatis, keras dan eksploitatif hampir selalu dihadapi oleh anak jalanan. (Astutik, 2004; Suyanto, 2010). Namun dari kehidupan jalanan yang keras pula, anak jalanan menjadi pribadi yang kuat dan berkeinginan keras untuk maju serta memperbaiki kehidupan mereka. Berbagai macam stimulasi dari lingkungan jalanan inilah yang selanjutnya membentuk persepsi anak jalanan tentang situasi pembelajaran (Walgito, 2010).

Karena masalah tersebut, dalam penelitian tentang anak jalanan ini, peneliti ingin mengalisis tingkat persepsi anak jalanan tentang situasi pembelajaran pada Program Kejar Paket A di Lembaga PPAP Kota Surakarta.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana persepsi anak jalanan tentang suasana pendidikan keseluruhan?
2. Bagaimana persepsi anak jalanan tentang kegiatan belajar?
3. Bagaimana persepsi anak jalanan tentang guru (pendidik)?
4. Bagaimana persepsi anak jalanan tentang prestasi akademik?
5. Bagaimana persepsi anak jalanan tentang suasana belajar?
6. Bagaimana persepsi anak jalanan tentang kehidupan sosial pribadinya?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan Umum**

Mengetahui persepsi anak jalanan tentang keseluruhan suasana pendidikan pada program Kejar Paket A di Lembaga PPAP SEROJA Kota Surakarta menggunakan *Dundee Ready Education Environment Measure* (DREEM).

#### **2. Tujuan Khusus**

- a. Mengetahui tingkat persepsi anak jalanan tentang kegiatan belajar.
- b. Mengetahui tingkat persepsi anak jalanan tentang guru (pendidik).
- c. Mengetahui tingkat persepsi anak jalanan tentang prestasi akademik.
- d. Mengetahui tingkat persepsi anak jalanan tentang suasana belajar.
- e. Mengetahui tingkat persepsi anak jalanan tentang kehidupan sosial pribadi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah wawasan mengenai tingkat persepsi anak jalanan tentang situasi pembelajaran di tempat belajarnya.
  - b. Dengan khasanah ilmu pengetahuan yang lebih luas, selanjutnya bisa dikembangkan ide penelitian yang lebih mendalam tentang anak jalanan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai evaluasi pemerintah dalam upaya peningkatan pendidikan anak jalanan dan memunculkan persepsi situasi pembelajaran yang positif.
  - b. Sebagai gambaran untuk perbaikan program pendidikan anak jalanan.
  - c. Sebagai bahan untuk penyuluhan pengembangan persepsi anak jalanan.